

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti, melalui khasanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data. Dalam hal ini berkaitan dengan tema yang diteliti, yaitu mengenai Strategi Pengkaderan Ulama Di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul *Strategi Pengkaderan Da'I Pondok Pesantren Daarul Hikmah Desa Pekayon Sukadiri Tangerang*. Oleh Sisworo Dwi Hendarsyah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Kesimpulannya, strategi yang dilakukan Pondok Pesantren Daarul Hikmah yakni membuat jadwal program pondok pesantren, membuat jadwal kegiatan dan menentukan pembimbing dalam setiap program.

Skripsi yang berjudul *Strategi Pendidikan Kader Ustadz (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Salaf Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)*. Oleh M. Budi Sulaiman, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. Kesimpulannya adalah strategi pendidikan kader ustadz Pondok Pesantren Salaf Al-Luqmaniyyah (PPLQ) dengan tinjauan manajemen program dilaksanakan dengan baik,

adapun strateginya: asistensi bergilir, pemantauan, pengabdian, evaluasi dan penetapan.

Skripsi yang berjudul *Sistem Pendidikan Kader Di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Periode 2005-2011)*. Oleh Khairuman, Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2011. Kesimpulannya menunjukkan bahwa Madrasah, asrama, organisasi kesiswaan dan kegiatan ekstra telah menjadi sebuah sistem pendidikan dalam rangka pembentukan kader yang unggul. Sistem dalam Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu formal dimana pendidikannya terintegrasi dengan sekolah dan nonformal terintegrasi dalam kegiatan ekstra dan organisasi kesiswaan.

Skripsi yang berjudul *Pola Kaderisasi Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Membangun Kepemimpinan Di Kabupaten Ponorogo*. Oleh Lilik Dwi Ningsih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2016. Kesimpulannya adalah pola yang digunakan oleh NU yaitu pola pesantren dimana masih banyak ditemukan model kedekatan dengan kiai, model silsilah keluarga dan juga silsilah kepengurusan.

Jurnal yang berjudul *Sistem Pengkaderan Berorganisasi Santri (Studi Kasus Di Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati Jawa Tengah)*. Oleh Moch. Taufiq Ridho, Jurnal PP Volume 1, No.2, Desember 2011

Yogyakarta. Kesimpulannya adalah bahwa penyelenggaraan proses kaderisasi di Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati Jawa Tengah telah sudah menerapkan prinsip manajemen kaderisasi diaplikasikan dalam tiga bentuk; Pertama, perencanaan kaderisasi dengan sistem presidium. Kedua, pelaksanaan kaderisasi dengan sistem presidium dan yang terakhir evaluasi kaderisasi dengan sistem presidium.

Dari data yang telah ditelusuri oleh peneliti menunjukkan belum ada suatu penelitian yang mengkaji secara spesifik terkait dengan tema “Strategi Pengkaderan Ulama Di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta”.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Strategi**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang memiliki arti “jenderal” atau “panglima”, sehingga strategi dapat diartikan sebagai ilmu kejenjeralan atau ilmu kepanglimaannya. (Suryani & Agung, 2012: 1) Adapun strategi dalam pengertian ilmu kemiliteran berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang. Kemudian menurut Gulo pengertian strategi tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan yang dapat diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk pengajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. (Suprihatiningrum, 2016: 148)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi berarti ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1515)

Menurut Djamarah dan Zain, kata strategi mempunyai arti suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.(Djamarah dan Zain, 2010:2) Sedangkan menurut T. Raka Joni strategi sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar-mengajar yang telah ditetapkan.(Suryani dan Agung, 2012: 2)

Dalam buku Amirullah, William F. Glueck berpendapat bahwasanya strategi itu merupakan sesuatu yang dipersatukan, bersifat komperhensif terintegrasi yang menghubungkan suatu lembaga terhadap tantangan lingkungan dan dirancang untuk meyakinkan bahwa sejarah dasar perusahaan atau organisasi akan dicapai dengan pelaksanaan yang tepat oleh organisasi yang menerapkannya. (Amirullah dan cantika, 2001: 4)

Menurut M. Kardiman, strategi adalah penentuan tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Sedangkan Sondang Siagian mengatakan bahwasanya strategi adalah cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan.(Siagian, 1986:17)

## 2. Kader dan Pengkaderan

Kader dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang-orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan-pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai (instansi atau organisasi) dll.( Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 656) Kata kader berasal dari bahasa Prancis yaitu *Cadre* yang memiliki makna bagian inti tetap dari suatu resimen kelompok elit yang terpilih karena terlatih dengan baik. Adapun kata kader dalam bahasa Latin adalah *Quadrum*, yang memiliki makna empat persegi panjang, bujur sangkar atau kerangka. Demikianlah kader dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang memiliki kualitas terbaik karena terpilih, yaitu merupakan tulang punggung (kerangka) dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen.(Tim Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2007: 31)

Istilah kader seringkali dihubungkan dengan anggota sebuah organisasi atau persyarikatan, baik yang bersifat sosial keagamaan, maupun yang bersifat politik. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peranan penting

pada pemerintahan, partai dan lain-lain.(Kamisa, 1997: 267) hal ini dikarenakan kader memiliki cakupan makna yang sangat luas. Selain itu kader juga akan diposisikan sebagai calon penerus yang akan melanjutkan estafed dari sebuah kepemimpinan suatu organisasi.

Oleh karena itu adanya kader dalam sebuah organisasi atau persyarikatan itu menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Demi menciptakan suksesi dan regenerasi kepemimpinan secara lancar dan berkesinambungan, sangat dibutuhkan tersedianya kader-kader pemimpin yang representatif untuk ditampilkan.

Dalam pedoman Majelis Pendidikan Kader (2010) pasal 1 ayat 4 ditegaskan bahwa “Kader adalah anggota inti yang terlatih serta memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita persyarikatan.” Jadi, jelas bahwa orang-orang yang berkualitas itulah yang terpilih dan berpengalaman dalam berorganisasi, taat asas dan berinisiatif, yang dapat disebut sebagai kader.( MPK PP Muhammadiyah, 2016: 34) Adapun kader merupakan bagian inti dari anggota, yang utama sebagai anak panah gerakan Muhammadiyah. Apapun yang sulit dan tidak dapat dilakukan oleh anggota, semuanya dapat dilakukan oleh kader, karena kader merupakan anggota yang terpilih atau anggota yang utama.(Tanfidz Mukhtar ke-46, 2010:198)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa pengkaderan adalah hal mendidik atau membentuk seseorang menjadi

kader. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya ada perbedaan mendasar tentang makna pengkaderan dengan perkaderan atau pendidikan kader itu sendiri. Maka yang terkandung dalam pengkaderan ialah proses, cara, kegiatan mendidik atau membentuk kader. Namun perlu diingat, dalam “pengkaderan” ini posisi kader sebagai obyek dan pasif yakni sebagai orang yang didik atau di bentuk menjadi kader. Sedangkan perkaderan, berasal dari kata kader yang ditambah prefik nominal *per* dan sufiks *an*. Sehingga dalam perkaderan posisi kader menjadi subyek dan aktif. Jadi yang dimaksud dengan pengkaderan adalah serangkaian prosesi, cara, kegiatan mendidik atau membentuk kader.(Kabry, 1988: 23)

Pengekaderan merupakan usaha yang sering dilakukan oleh suatu organisasi dalam membangun *character Building* terhadap para kadernya. Usaha tersebut di antaranya berisikan penanaman nilai-nilai idiologi yang dipegang oleh suatu organisasi maupun ketrampilan dalam memimpin. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam proses pengkaderan, karena posisi kader nantinya adalah orang yang akan menggantikan estafed kepemimpinan dalam sebuah organisasi.

#### a. Unsur-Unsur Pengkaderan

##### 1) Pengkaderan

Maksud dari pengkaderan disini adalah orang yang berstatus sebagai pendidik atau yang mempunyai materi pengkaderan, dalam proses pengkaderan. Sebenarnya peran

pendidik sangatlah menentukan sebuah pengkaderan. Betapapun baiknya seorang pendidik, apabila dikerjakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, maka hasilnya pun berkualitas. Pengkader dalam penelitian ini adalah pihak Pengasuh (BPH) dan Dewan *Asatid* PUTM.

## 2) Peserta Pengkaderan

Peserta pengkaderan adalah orang-orang yang menjadi objek pengkaderan, yakni para *talabah*. Pada dasarnya sasaran dari pengkaderan adalah para generasi muda, akan tetapi secara khusus dalam penelitian ini adalah para *talabah* PUTM.

## 3) Kurikulum Pengkaderan

Yaitu seperangkat program penunjang yang meliputi materi, pengelolaan perkaderan dan evaluasi sebagai pedoman dalam rangka mencapai suatu tujuan. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum antara lain:

- a) Prinsip Ketauhidan
- b) Prinsip Kerahmatan
- c) Prinsip kemaslahatan
- d) Prinsip Kemajuan
- e) Prinsip Rasionalitas dan Keilmuan
- f) Prinsip Kreatifitas Lokal dan Desentralisasi Proporsional
- g) Prinsip Fleksibilitas, Efektivitas, dan Efisiensi.

h) Prinsip Hukum dan Keadilan (MPK PP Muhammadiyah, 2010: 67-68)

#### 4) Materi Pengkaderan

Materi pengkaderan merupakan tema-tema yang diangkat atau diberikan dalam proses pengkaderan. Biasanya materi-materi tersebut terdiri dari:

- a) Materi dasar keislaman (ilmu alat: *Nahwu, Saraf, Ushul Fiqh*, dll)
- b) Pengetahuan Umum
- c) Muatan lokal

Perlu diketahui bahwasanya ada pula kategori-kategori lain yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses kaderisasi sebagai tambahan dan tentunya disesuaikan dengan organisasi/lembaga yang bersangkutan.

#### b. Teori Pendidikan Kader

##### 1) Teori Kepemimpinan secara Alamiah

Teori ini beranggapan bahwa hasil proses alamiah dalam kehidupan manusia akan membentuk pribadinya. Adapun ketrampilan memimpin seseorang itu dipengaruhi oleh interaksi alamiahnya dapat di karenakan bakat bawaan atau keturunan. (Fakeh dan Wijayanto, 2001: 6)

## 2) Teori Kelahiran Pemimpin secara Terencana

Teori ini beranggapan bahwasanya untuk mempersiapkan kader yang handal dalam memimpin diperlukan perencanaan yang matang dan terukur. Adanya organisasi-organisasi mahasiswa tentunya dapat memberikan pengaruh positif untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, karena kaderisasi yang dilakukan sifatnya terukur dan memiliki perencanaan yang matang. Adapun bentuk pengkaderan yang terencana dapat berbentuk *training* atau latihan kepemimpinan yang berjenjang *up grading*, distribusi kesempatan memimpin yang ideal, dan sebagainya.

## 3) Teori Humanistik

Teori ini mendasarkan pada dalil “manusia karena sifatnya adalah organisasi yang dimotivasi, sedangkan sifatnya adalah tersusun dan terkendali”. Jadi menurut teori ini diperlukan motivasi pada kader dengan memenuhi harapan-harapan mereka dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka (fisiologis, keamanan, sosial, dll). Oleh karena itu melakukan motivasi berarti melakukan *human relation*.(Pamudji, 1985: 150)

### **3. Strategi Pengkaderan**

Setelah adanya penjabaran baik terkait dengan strategi dan pengkaderan, maka yang dimaksud dengan strategi pengkaderan adalah suatu garis besar haluan dengan adanya cara-cara tertentu yang di dalamnya terdapat proses kegiatan-kegiatan dalam membentuk pribadi yang berkualitas, memiliki keyakinan yang kuat, terampil dan ahli dalam bidangnya.

Jadi yang dimaksud dengan strategi pengkaderan pada penelitian ini adalah materi, metode serta program-program pengkaderan yang dilakukan oleh pengasuh (BPH dan Pamong) dan Dewan *Asatid* Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya mendidik, mengkader para calon Ulama agar sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya dan sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

### **4. Sistem Pendidikan Secara Umum**

Sistem pendidikan terdiri dari tiga jalur yaitu formal, informal dan non formal.

#### **a. Formal**

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Contohnya; SD, MI, SMP, MTS,

SMA, MA, SMK, MAK, dan pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister dsb).(Machfoedz, 2007: 52)

b. Non Formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Penyelenggara satuan pendidikan non formal meliputi satuan pendidikan; lembaga khusus, dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis ta'lim, pendidikan anak usia dini jalur non formal.

Penyelenggaraan program pendidikan non formal meliputi; pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini (contohnya: kelompok bermain, taman penitipan anak), pendidikan kepemudaan (organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi kepanduan, organisasi palang merah dsb) organisasi keirausahaan dsb.(Joesoef, 1992:50)

c. Informal

Pendidikan informal Merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Salah satu contoh pendidikan informal adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.(Sumarno, 2011: 81)

## 5. Sistem Perkaderan Di Beberapa Organisasi Keagamaan

### a. Persatuan Islam (Persis)

Adapun sistem perkaderan di Persis lebih mengembangkan sistem pesantren yang bergerak dibidang pendidikan dengan jenjang yang paling tinggi adalah menengah atas (SMA/MA). Seiring perkembangan teknologi pendidikan di Persis berusaha menjadi lembaga pendidikan dinamis yang mampu bersaing dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan unsur-unsur kepesantrenan.

Dalam sebuah sistem tentu tidak akan terlepas dengan input , *instrumental Input, proses* dan *output*. Input yang di maksud adalah santri. Banyak hal yang dibahas tentang kondisi objektif santri, di antaranya: bagaimana latar belakang pendidikan, ekonomi, keluarga dan status keorganisasian sehingga kualitas santri dapat diketahui sebagai dasar sebelum masa penggemblengan. Proses, dalam proses pendidikan ini, ada beberapa komponen inti yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pendidikan, diantaranya; materi, metode, media, sarana dan evaluasi. Output, dalam hal ini bermakna alumni atau lulusan dari pendidikan Persis. Alumni yang berasal dari pendidikan Persis memiliki peran yang cukup signifikan, salah satunya yaitu sebagai Pembina ekstra kulikuler serta menjadi badal ustadz ketika berhalangan hadir.

Adapun kurikulum yang ada di gunakan oleh Persis adalah perpaduan antara kurikulum Depag dan kurikulum bidang Tarbiyah PP Persis. Akan tetapi realitanya kurikulum pesantren lebih dominan, terbukti dengan jumlah mata pelajaran pesantren yang jauh lebih banyak. Perlu diketahui bahwasanya materi yang paling dijaga oleh Persis adalah materi Kebersihan dan Qiroatul Qutub meskipun sudah mulai memudar. Adapun materi “Fiqh” ini sangat dijaga kekhasannya karena mereka tidak ingin para santrinya terkontaminasi dengan paham fiqh yang lain, dan karena di dalam materi fiqh ini juga merupakan salah satu strategi dalam ranah materi untuk menanamkan pemahaman idiologi Persis kepada para santrinya.

Metode yang digunakan oleh Persis dalam mendidik dan sampai sekarang dipertahankan dan menjadi ciri khas dari Persis adalah metode debat. Metode ini merupakan metode warisan guru besar Persis yaitu A. Hassan. Adanya metode ini diyakini dapat melatih daya kritis para santri serta melatih santri dalam mempertahankan argumentasinya. Adapun evaluasi yang dilaksanakan melalui dua cara yakni evaluasi secara lisan dan evaluasi tertulis.(Rokayah, 2012)

b. Sistem Perkaderan Di Nahdlatul Ulama (NU)

Organisasi Islam yang didirikan di Surabaya pada tahun 1926 ini juga memberikan kontribusi terhadap dunia dalam jalur pendidikan. Tentunya dengan konsep yang khas melekat pada organisasi ini. Sudah masyhur NU dikenal dengan sistem pondok pesantren tradisionalnya. Walaupun pondok pesantren keberadaannya sudah ada jauh sebelum NU berdiri sebagai organisasi, bahkan lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pondok pesantren sehingga sebagian sejarawan menilai sistem pondok pesantren asli (genuin) berasal dari Indonesia. Akan tetapi semua pondok pesantren yang didirikan oleh NU tidak berafiliasi terhadap NU. Pondok menjadi milik Kiainya langsung (yang berafiliasi NU) sebagai pendiri sekaligus pemimpinnya.

Sebagai sekolah yang bersistem pondok pesantren materi yang diajarkan tentunya bersifat keagamaan. Adapun sumber kajian atau mata pelajarannya adalah kitab-kitab berbahasa Arab. Kitab-kitab yang dikaji adalah kitab-kitab dari abad pertengahan yang lazim disebut kitab kuning.

Adapun metode yang digunakan dalam pendidikannya adalah metode wetonan, sorogan, dan hafalan. Metode wetonan adalah metode kuliah di mana para santri duduk di sekeliling Kiai yang menerangkan pelajaran. Sorogan adalah metode di mana santri

membaca kitab tertentu lalu menghadap kepada kiai atau guru satu persatu. Metode hafalan adalah metode di mana santri menghafal bait-bait dalam kitab tertentu dihadapan para guru, biasanya hafalan tersebut dalam bentuk syair atau nadzam agar lebih mudah untuk dihafalkan.

Prinsip-prinsip pendidikan pesantren ada dua belas yang harus dipegang; Theocentric, suka rela dalam pengabdian, kearifan, kesederhanaan, kolektivitas, kebebasan terpimpin, kemandirian, pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdikan, mengamalkan ajaran agama, belajar di pesantren bukan untuk mencari ijazah dan restu Kiai artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat bergantung pada kerelaan dan doa dari Kiai.(Rubaidi, 2010: 22)

Kini sistem pendidikan di NU sudah mengalami beberapa perubahan dengan menggabungkan antara sistem pesantren dengan sistem sekolah pada umumnya. Jadi baik materi maupun metode yang digunakan juga sudah mengalami adanya sedikit perombakan. Karena harus menyesuaikan dengan sistem-sistem sekolah pada umumnya. Walaupun demikian sistem pesantren tidak dapat ditinggalkan oleh NU dalam mendidik para santrinya, karena sudah menjadi salah satu ciri khas tersendiri bagi NU dalam mencetak kader-kader penerusnya.

Adapun budaya yang sangat kental dalam sistem pendidikan di NU adalah sikap *ta'dzim* kepada Kiai maupun Ustadz-ustadzahnya, karena sejak awal mereka belajar di pendidikan NU mereka diajarkan terlebih dahulu kitab *Ta'lim Muta'allim* yang berisikan sikap santri dalam proses belajar. Dalam mempertahankan belajar kitab kuning NU juga dapat diakui sangat baik ketika mengajarkan kitab-kitab tersebut.

## **6. Sistem Perkaderan Di Muhammadiyah**

Sistem perkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah “Seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah.” (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 37)

Sebagai sebuah sistem, unsur-unsur yang terkandung dalam SPM ini adalah visi, misi dan tujuan perkaderan Muhammadiyah; penitikberatan perkaderan; kurikulum perkaderan; profil dan kompetensi kader; pengembangan materi perkaderan; jenis dan bentuk perkaderan; struktur penjenjangan perkaderan; dan peorganisasian perkaderan. Dalam hal ini, sistem perkaderan dan organisasi otonom (umum dan khusus) juga merupakan bagian dari SPM. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 37)

Setiap ortom Muhammadiyah ('Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, dan Tapak Suci) melaksanakan program dan kegiatan perkaderannya berdasarkan kekhasan masing-masing, dengan tetap mengacu dan mengindahkan konsep dasar, prinsip dan kurikulum dalam SPM secara konsisten. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 38)

a. Perkaderan Sebagai Sebuah Sistem

Sebagai sebuah sistem yang utuh, maka SPM berlaku menyeluruh bagi semua jajaran dan komponen persyarikatan. Konsekuensinya SPM menyangkut semua bentuk dan jenis kaderisasi dan pelatihan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal.

Maksud dari vertikal adalah SPM berlaku bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pusat hingga ranting, sebagai acuan dan pola dalam pelaksanaan kaderisasi secara optimal sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sedangkan maksud dari horizontal adalah SPM berlaku dan meningkatkan seluruh unsur pembantu pimpinan (Majelis dan Lembaga), organisasi otonom (umum dan khusus), dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di seluruh jenjang kepemimpinan Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagai acuan dan pola kaderisasi. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 38)

Karena semua itu bersifat mengikat dan menyeluruh, maka sistem perkaderan yang dimiliki masing-masing ortom ('Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyyatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, dan Tapak Suci Muhammadiyah) menjadi bagian dari SPM. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:38)

b. Visi Misi dan Tujuan Pengkaderan di Muhammadiyah

Adapun rumusan Visi dan Misi perkaderan Muhammadiyah adalah:

Visi: kader Muhammadiyah paripurna untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Misi:

- 1) Mengintensifkan peneguh ideologi Muhammadiyah di seluruh lini Persyarikatan, Ortom, dan AUM.
- 2) Menyinambungkan pewarisan nilai-nilai ber-Muhammadiyah;
- 3) Mengoptimalkan revitalisasi kader.

Tujuan:

Mengacu pada visi dan misi tersebut, maka rumusan tujuan perkaderan Muhammadiyah adalah: "Terbentuknya kader Muhammadiyah yang berjiwa Islam berkemajuan serta mempunyai integrasi dan kompetensi untuk berperan dalam persyarikatan,

kehidupan umat, dinamika bangsa dan konteks global”. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 41)

c. Jenis Dan Bentuk Perkaderan

Perkaderan Muhammadiyah dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis kegiatan kaderisasi yang terarah, terencana dan berkesinambungan. Jenis-jenis kegiatan kaderisasi yang dapat dilaksanakan secara umum terdiri dari dua kategori:

1) Perkaderan Utama

Merupakan kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta sistem dan aksi gerakan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Majelis Pendidikan Kader (Pusat sampai Cabang) dan Amal Usaha Muhammadiyah. Kaderisasi yang termasuk kategori perkaderan utama adalah Darul Arqam dan Baitul Arqam.

a) Darul Arqam

Darul Arqam merupakan bentuk kegiatan kaderisasi yang utama dan khas dalam Sistem Perkaderan Muhammadiyah yang bertujuan untuk membentuk sistem cara berpikir dan sikap kader dan pemimpin yang kritis,

terbuka dan penuh komitmen terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 57)

Adapun materi dalam darul arqam terdiri dari 5 kelompok materi dan terbagi menjadi dua jenjang yaitu wilayah dan pusat. Keempat kelompok materi merupakan materi wajib dan di tingkat wilayah diberi peluang untuk menambah dengan muatan lokal.

b) Baitul Arqam

Baitul Arqam merupakan modifikasi dan penyederhanaan dari Darul Arqam yang diselenggarakan untuk tingkat pimpinan ranting, serta AUM. Sasarannya simpatisan, anggota, pimpinan Muhammadiyah, dan pimpinan (*middle manager* ke bawah) serta karyawan Amal Usaha Muhammadiyah. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 58)

2) Perkaderan Fungsional

Merupakan kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus atau kajian intensif yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi tertentu dari suatu majelis atau lembaga. Perkaderan fungsional

merupakan pendukung dari perkaderan utama dan berfungsi untuk pengembangan sumberdaya kader. Perkaderan ini lebih fleksibel mengingat prinsip penyelenggaraannya yang desentralistik-otonomis-sistemik. Contohnya:

a) Sekolah Kader

Sekolah Kader merupakan suatu lembaga pendidikan formal di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan khusus serta program secara resmi sebagai tempat pendidikan kader (pelajar dan mahasiswa), seperti Pendidikan Ulama Tarjih, Mu'allimin, Mu'allimaat yang ada di Yogyakarta. Ketentuan untuk penetapan dan pendirian sekolah kader hanya bisa dilakukan atas dasar rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 59)

b) Pelatihan Instruktur

Merupakan salah satu bentuk kegiatan kaderisasi pendukung yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kader Muhammadiyah sebagai pelatih (instruktur) dalam mengelola dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan kaderisasi di persyarikatan Muhammadiyah. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:60)

c) Dialog Ideopolitor

Dialog Ideopolitor (ideologi, politik dan organisasi) merupakan kaderisasi bagi pemimpin persyarikatan dan AUM yang didesain dalam bentuk dialog dengan panelis dan diskusi dengan sesama peserta dalam bentuk dinamika kelompok untuk memberikan pemahaman bagi kader dan pemimpin organisasi Muhammadiyah tentang peta mutakhir ideologi politik-ekonomi dan gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia, baik skala dalam maupun regional dan nasional. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:60)

d) Pelatihan yang diselenggarakan oleh Majelis dan Lembaga

Pelatihan-pelatihan di lingkungan Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah ini antara lain: pelatihan pembantu kader hisab dan falak (Majelis Tarjih dan Tajdid), pelatihan kader Mubaligh (Majelis Tablig), dan berbagai bentuk pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh majelis dan lembaga.

e) Pengajian Pimpinan

Merupakan pengajian terbatas bagi pengembangan wawasan dan pendalaman nilai-nilai ideologi gerakan Muhammadiyah yang diikuti oleh pimpinan persyarikatan,

pimpinan ortom dan pimpinan AUM serta ditambah kalangan tertentu yang dipandang perlu warga atau tokoh Muhammadiyah. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:61)

f) Pengajian Khusus

Bentuk pengajian ini dirancang dan diselenggarakan secara khusus sebagai media internalisasi dan peneguhan paham agama dan ideologi gerakan Muhammadiyah bagi setiap warga persyarikatan di lingkungan masing-masing. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:61-62)

g) Pelatihan Tata Kelola Organisasi/Upgrading

Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal memberikan bekal kemampuan manajerial dan administratif bagi pimpinan persyarikatan serta pengelola Amal Usaha Muhammadiyah agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dan pengelola secara professional dan dinamis dengan tetap berpijak pada visi dan misi Muhammadiyah. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:62)

h) Diklat Khusus

Pendidikan dan pelatihan ini berorientasi pada pengembangan sumberdaya kader dan pemekaran potensinya sehingga bisa mendukung peran kader di luar persyarikatan dan menjadi pintu masuk bagi simpatisan dan calon kader Muhammadiyah. Seperti, diktat Jurnalistik,

pelatihan pengembangan kapasitas kecerdasan emosional dan spiritual, diklat kepemimpinan, dan Out Bound Training. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:62)

d. Pengorganisasian Perkaderan Muhammadiyah

Agar perkaderan berjalan dengan baik, diperlukan kepanitiaan tersendiri yang secara khusus menangani jalannya perkaderan. Penyelenggaraan perkaderan meliputi proses yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun dan mempersiapkan rencana perkaderan sebelum dilaksanakan. Langkah-langkahnya antara lain:

- a) pertemuan dan musyawarah di tingkat pimpinan untuk menentukan rencana pelaksanaan perkaderan.
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan perkaderan.
- c) Mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi/publikasi dan pemberitahuan lainnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Pembentukan tim tertentu dengan tugas-tugas yang diembannya.
- e) Identifikasi calon peserta, termasuk di dalamnya proses seleksi calon peserta.

- f) Penyusunan jadwal dan rancangan kegiatan yang akan dilakukan selama waktu yang telah ditentukan.
- g) Menyiapkan narasumber sesuai rancangan materi dengan kemungkinan perubahan bila dipandang perlu.
- h) Pengadaan instrumen-instrumen / perangkat-perangkat kegiatan seperti instrument evaluasi, fasilitas presentasi, dll.
- i) Pengadaan dana, sarana dan presarana untuk pelaksanaan.
- j) Persiapan bidang administrasi, kesekretariatan, persidangan, dokumentasi, publikasi, akomodasi, konsumsi, transportasi, dll yang dibutuhkan.
- k) Langkah-langkah persiapan lainnya sebelum persidangan di atas, seperti pengecekan akhir persiapan.
- l) Penyempurnaan langkah persiapan bila dipandang perlu setelah pengecekan. (MPK PP Muhammadiyah, 2010: 101)

## 2) Pelaksanaan

Merupakan proses pelaksanaan dan pengelolaan perkaderan. Proses inilah sebenarnya inti dari penyelenggaraan perkaderan. Tahap ini meliputi:

- a) Konsolidasi dan penataan persiapan untuk pelaksanaan dengan mengadakan pertemuan teknis dan koordinasi antara SC dan OC dan tim instruktur.
- b) Pembukaan acara dengan segala rangkaian dan protokolernya. Pelaksanaan acara antara lain meliputi

orientasi, penerapan jadwal dan metode yang sudah direncanakan, pengendalian acara dan langkah-langkah operasional lainnya oleh pihak yang terlibat

- c) Pengorganisasian tim instruktur
- d) Evaluasi pelaksanaan meliputi komponen konteks, input, proses, output, dan outcome dari program perkaderan tersebut.
- e) Pertemuan pimpinan dan tim fasilitator untuk menentukan kelulusan peserta dan hal-hal lainnya dianggap penting.
- f) Penutupan acara dengan segala rangkaiannya.(MPK PP Muhammadiyah, 2010: 101)

### 3) Tindak Lanjut

Tahap ini merupakan proses ikutan yang harus dirancang bersama guna kepentingan program selanjutnya bagi peserta perkaderan. Fungsi dan tujuan dari aktivitas tindak lanjut ini adalah untuk menjaga kebersamaan dan silaturahmi antar eks peserta perkaderan, membangun solidaritas, dan berbagai informasi perkembangan untuk memperkaya wawasan dan memepersegar semangat ber-Muhammadiyah. Rencana ini meliputi:

- a) Pelaporan acara
- b) Penugasan bagi eks peserta perkaderan

- c) Pembinaan, peningkatan, dan pengembangan lanjutan bagi eks peserta perkaderan, melalui berbagai aktivitas
  - d) Koordinasi dan pengadaan forum komunikasi serta informasi bagi eks peserta perkaderan
  - e) Transformasi dan diverifikasi kader ke berbagai struktur, fungsi, tugas, dan aktivitas termasuk di dalamnya promosi kader.(MPK PP Muhammadiyah, 2010: 102)
- e. Kurikulum Perkaderan Muhammadiyah

Dalam sistem perkaderan di Muhammadiyah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi, pengelolaan perkaderan dan evaluasi yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai tujuan perkaderan Muhammadiyah.(MPK PP Muhammadiyah, 2016:66)

1) Materi Perkaderan

Terkait dengan materi terdapat empat kelompok materi wajib dalam kurikulum perkaderan Muhammadiyah, yaitu kelompok materi ideologi Muhammadiyah, kelompok materi pengembangan wawasan, kelompok materi sosial kemanusiaan dan kepeloporan, kelompok materi kepemimpinan dan keorganisasian di tambah satu materi muatan lokal yang bersifat pilihan dengan pertimbangan jenis dan jenjang

perkaderan,waktu, segmentasi dan kualifikasi peserta. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:80-81)

a) Kelompok Materi Ideologi Muhammadiyah

Kelompok materi ini merupakan materi-materi pembentukan nilai, karakter dan keyakinan hidup, seperti peran tauhid dalam kehidupan, MADM, makna ibadah, tuntunan ibadah sesuai putusan tarjih dll. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 81)

b) Kelompok Materi Pengembangan Wawasan

Materi ini merupakan pembentukan kekuatan berpikir dan pengembangan wawasan, mencakup metodologi pemahaman agama Islam, manhaj tarjih Muhammadiyah, dinamika pembaharuan Islam era klasik, pertengahan dan kontemporer, fikih ikhtilaf dll. (MPK PP Muhammadiyah, 2016: 81)

c) Kelompok Materi Sosial Kemanusiaan dan Kepeloporan

Kelompok materi ini merupakan pembentukan sikap dan perilaku sosial dalam dimensi kemanusiaan global yakni PHIWM,tauhid sosial, HAM dan advokasi kaum Dhu'afa, teologi al-Ma'un, dakwah kultural, strategi pengembangan organisasi, paradig tajdid Muhammadiyah dll. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:81-82)

d) Kelompok Materi Kepemimpinan dan Keorganisasian.

Kelompok materi ini merupakan pembentukan sikap dan kecakapan berorganisasi, yang mencakup akhlak kepemimpinan Muhammadiyah, revitalisasi kader Muhammadiyah, etos kerja kader Muhammadiyah, revitalisasi pendidikan Muhammadiyah, politik dan kebijakan publik dll. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:82)

e) Kelompok Materi Muatan Lokal

Kelompok materi muatan lokal adalah materi-materi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi segmentasi peserta perkaderan, mencakup antara lain; pendidikan kader di perguruan Muhammadiyah, regenerasi dalam Muhammadiyah, dakwah berbasis lokalitas, guru/dosen profesional, technopreneurship, dan materi-materi lain yang sesuai kebutuhan. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:83)

Baik perkaderan utama (Darul Arqam maupun Baitul Arqam) maupun perkaderan fungsional memiliki muatan materi atau beban belajarnya masing-masing sesuai dengan jenis dan jenjangnya. Adapun beban belajar Darul Arqam untuk tingkat wilayah berjumlah 21 materi (20 wajib dan satu mulok) berjumlah 40 jam pelajaran dikelas, ditambah 2 materi praktik selama 5 hari 4 malam. Darul Arqam tingkat Pusat beban belajarnya adalah 30 materi, berjumlah 58 jam

pembelajaran di kelas. Adapun beban belajar perkaderan fungsional berjumlah 8 materi (7 wajib dan satu pilihan), berjumlah 12 jam pembelajaran di kelas, di tambah 2 materi praktik selama 2 hari 1 malam. Satu jam pelajaran ekuivalen dengan 45 menit.

## 2) Metode Perkaderan

Pada dasarnya perkaderan adalah proses pembelajaran kader. Untuk itu diperlukan teori belajar sebagai landasan teoritik dan model sebagai acuan operasionalnya. Teori belajar yang menjadi landasan teoritik perkaderan Muhammadiyah adalah landasan teori belajar Konstruktivisme, yaitu teori yang melihat bahwa belajar merupakan proses merekonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi baru yang telah diperoleh oleh subyek belajar. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:93)

Dari teori belajar tersebut kemudian dipilih model pembelajaran andragogi sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar orang dewasa untuk mencapai tujuan perkaderan. Adapun pemilihan teori dan model pembelajaran ini didasarkan atas pertimbangan bahwa peserta perkaderan terdiri dari orang dewasa yang telah memiliki konsep diri, pengetahuan, pengalaman, kesiapan belajar dan perbedaan

dalam orientasi belajar yang berbeda dengan remaja dan anak-anak. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:93)

Model pembelajaran andragogi merupakan seni dan ilmu dalam membantu peserta perkaderan yang terdiri dari orang dewasa untuk belajar. Pembelajaran andragogi juga dikenal sebagai teknik pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Oleh karena itu metode dan teknik pembelajaran selalu melibatkan pembelajar. Untuk itu pengelola perkaderan hendaknya mampu bersama-sama pembelajar untuk: (a) mendefinisikan kebutuhan perkaderan; (b) merumuskan tujuan perkaderan; (c) ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan perkaderan; dan (d) berpartisipasi dalam mengevaluasi proses dan hasil kegiatan perkaderan. Dengan optimalisasi tersebut diharapkan perkaderan dapat berjalan dengan efektif. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:94)

Berangkat dari model andragogi ini, dikembangkan pembelajaran stratesi belajar *active learning* yaitu sebuah pembelajaran yang mengandaikan pembelajaran mengambil peran aktif sebagai subyek belajar dengan pendekatan partisipatif dialogis. Kemudian secara operasional dipakailah teknik dan metode pembelajran yang sesuai dengan tujuan, sifat materi, narasumber, fasilitas serta waktu pembelajaran dalam proses perkaderan.

### 3) Evaluasi Perkaderan

Evaluasi merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem perkaderan, karena menjadi upaya untuk mengetahui seberapa jauh hasil kegiatan perkaderan yang telah dilaksanakan. Dalam evaluasi lebih ditekankan pada aspek *output* perkaderan dan dilaksanakan dengan pendekatan *expost facto* yaitu mengungkap apa yang dilakukan dan terjadi dalam perkaderan. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:94)

Evaluasi perkaderan adalah rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil perkaderan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan perkaderan.

Dengan demikian evaluasi berfungsi (1) mendapatkan informasi tentang tingkat keberhasilan dan efisiensi program perkaderan dan selanjutnya (2) informasi itu dipergunakan untuk bahan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dalam kebijakan perkaderan.

Ada lima komponen yang menjadi fokus evaluasi perkaderan yaitu:

- a) Komponen konteks : meliputi kesesuaian antara program perkaderan dengan landasan hukum sebagai acuan kebijakan, tantangan masa depan kader dsb.

- b) Komponen input: sumberdaya manusia , kurikulum perkaderan sarana dan peralatan pendukung serta aspek pembiayaan.
- c) Komponen proses: berupa aspek kepemimpinan dan manajemen, proses pembelajaran serta proses penilaian.
- d) Komponen output: berupa prestasi belajar peserta perkaderan secara individual dan kelompok pelatihan. Evaluasi belajar dilakukan berdasarkan pada interaksi peserta perkaderan dengan narasumber, instruktur dan sumber belajar lainnya. (MPK PP Muhammadiyah, 2016:95-96)
- e) Komponen outcome: pada dasarnya mempertanyakan dampak dari perkaderan. Dampak biasanya muncul setelah output terjadi beberapa lama. Dampak itu berupa kepercayaan terhadap kader dalam bentuk keterlibatan kader dalam kegiatan persyarikatan dan rekrutmen dalam struktur pimpinan.

Disamping kegiatan evaluasi diperlukan pula kegiatan monitoring perkaderan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan perkaderan, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, apakah ada kendala dan hambatan yang ditemui, dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala

tersebut. Monitoring lebih bersifat pengontrolan selama program perkaderan berjalan dan lebih bersifat klinis. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi diperlukan prosedur dan mekanisme yang mengatur tentang siapa yang berhak dan urutan kegiatan evaluasi. Di samping itu diperlukan metode dan teknik penilaian yang dilengkapi dengan instrumen yang sesuai dengan obyek dan kompetensi yang dinilai.

## 7. Ulama

Kata Ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari mufrad *عالم* (*'alim*) berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata *عالم* adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il dari kata kerja *علم* (*'alima*) yang berarti telah berilmu atau mengetahui, sedangkan kata *علماء* berarti orang yang berilmu atau orang yang mengetahui. (Yunus, 1979: 278) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan Ulama memiliki arti orang yang pandai dalam hal agama Islam. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1774)

Bila kata Ulama ini dihubungkan dengan perkataan lain seperti Ulama Hadits, Ulama Tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apapun ilmunya, baik

ilmu agama Islam maupun ilmu-ilmu umum lainnya. Menurut pemahaman yang berlaku hingga kini, Ulama adalah mereka yang ahli dalam arti memiliki kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab, dan ilmu alatnya seperti *Saraf, Nahwu, Balagh* dan sebagainya.(Muhtarom, 2005: 12)

Menurut Sayid Qutub Ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami kitab Al-Qur'an.(Qutub, 1967: 698) sedangkan menurut Sufyan Al-Tsauri berpendapat bahwa Ulama itu ada tiga macam:

- a. Orang yang mengetahui Allah dan urusannya, yaitu orang yang takut kepada Allah SWT, dan mengetahui batas-batas dan kewajiban-kewajibannya.
- b. Orang yang mengetahui Allah, tetapi tidak mengetahui tentang urusan Allah SWT, yaitu orang yang takut kepada Allah tetapi tidak mengetahui tentang syari'at-syari'at dan kewajiban-kewajiban-Nya.
- c. Orang yang mengetahui (*'alim*) tentang urusan Allah tetapi tidak takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang hanya tau tentang syari'at dan kewajiban-kewajiban-Nya tetapi orang tersebut tidak takut kepada Allah SWT.(Katsir, t.th: 554)

Hasan Al-Basri berpendapat bahwasanya Ulama adalah orang ‘*alim* (Ulama) yang takut kepada Allah disebabkan perkara gaib dan senang kepada yang disenangi Allah serta meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah SWT.(Maraghi, 1974: 127) dalam Ensiklopedi Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut timbullah rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. seperti halnya dalam firman Allah Q.S Al-Faathir ayat 29:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya:”Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah Ulama”(Q.S Fatir: 28) (Departemen Agama, 2015:437)

Sebagai orang yang berpengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam yang patut dicatat yakni mereka sebagai kelompok terpelajar yang telah membawa pencerahan dan perubahan kepada kebaikan di masyarakat sekitarnya.

Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa Ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara’ untuk menetapkan sah itikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili berpendapat “secara naluri, Ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan

dan orang yang bermaksiat hakikat bukanlah Ulama.”(Hsukby, 1995: 45-46)

Rasulullah menerangkan kemuliaan Ulama di atas manusia lainnya karena Allah telah memberikan tempat yang istimewa baginya.(Baharits, 2008: 159) Ulama merupakan pewaris para Nabi yang harus kita Hormati bukanlah sembarang Ulama, yang dimaksud dengan Ulama adalah orang yang berilmu, dengan ilmu tersebut menjadikannya menjadi takut kepada Allah SWT, sehingga Ulama bukanlah orang yang durhaka.(Yani, 2008: 341) Pembentukan masyarakat dan kelestariannya juga tidak dapat dipisahkan dari adanya Peran Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara Kesenambungan.(Anwar, 2003: 13)

#### a. Kriteria Ulama

Dari beberapa definisi ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut Ulama apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Menguasai ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddīn*) dan sanggup membimbing umat dengan memberikan bekal ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.
- 2) Ikhlas melaksanakan ajaran Islam
- 3) Mampu menghidupkan sunnah Rasul dan mengembangkan Islam secara *kaffah*.

- 4) Berakhlak luhur, berpikir kritis, aktif mendorong masyarakat melakukan perbuatan positif, bertanggung jawab, dan istiqamah.
- 5) Berijwa besar, kuat mental dan fisik, tahan uji, hidup sederhana, amanah, beriradah, berjamaah, tawadlu, kasih sayang terhadap sesame, mahabah, serta *khasyyah* dan tawakkal kepada Allah.
- 6) Mengetahui dan peka terhadap situasi zaman serta mampu menjawab setiap persoalan untuk kepentingan Islam dan umatnya.
- 7) Berwawasan luas dan menguasai beberapa cabang ilmu demi pengembangannya. Menerima pendapat orang lain yang tidak bertentangan dengan Islam dan bersikap tawadlu. (Hsubky, 1995: 47)